

Analisis Kebijakan Beasiswa Pemkab Bojonegoro: Peluang dan Tantangan Bagi Anak Petani Untuk Kuliah

Khoeru Nikmah¹, Sri Minarti²

¹Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro

²Fakultas Tarbiyah dan Pascasarjana, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro

khoirun.nkmh1@gmail.com¹, minarti@sunan-giri.ac.id²

Article Info

Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

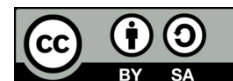
Keywords:

Bojonegoro Scholarship, Farmers' Children, Higher Education, Policy Education.

ABSTRACT

Bojonegoro Regency Government allocates a large budget for higher education scholarships to increase the human development index. However, most of Bojonegoro's social structure is in the agricultural sector with unstable income. This study aims to analyze the effectiveness of local scholarship policies in opening sociological opportunities for farmers' children and mapping the administrative challenges faced. The research method uses a descriptive qualitative approach with a document-based policy analysis type. Data sources come from Bojonegoro Regent Regulation Number 42 of 2025, regional publication reports, and secondary demographic data. The data analysis technique uses content analysis. The results show that the integration of the Kartu Petani Mandiri (KPM) into the Two Undergraduates per Village Scholarship scheme expands the opportunities for social mobility of farmers' children. However, its effectiveness is hindered by the digital divide in rural areas, the complexity of poverty data coordination, and quota restrictions. In conclusion, this policy succeeded in breaking down the financial barriers of the agricultural community, but requires simplification of bureaucracy and the provision of registration helpdesks at the sub-district level.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

Keywords:

Anak Petani, Beasiswa Bojonegoro, Kebijakan Pendidikan, Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran besar untuk beasiswa pendidikan tinggi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia. Namun, sebagian besar struktur masyarakat Bojonegoro berada di sektor pertanian dengan pendapatan tidak menentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan beasiswa daerah dalam membuka peluang sosiologis bagi anak petani serta memetakan tantangan administratif yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi analisis kebijakan berbasis dokumen. Sumber data berasal dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025, laporan publikasi daerah, dan data sekunder kependudukan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Kartu Petani Mandiri (KPM) dalam skema Beasiswa Dua Sarjana per Desa memperluas peluang mobilitas sosial anak petani. Namun, efektivitasnya terhambat oleh kesenjangan digital di pelosok desa, kompleksitas koordinasi data

kemiskinan, dan pembatasan kuota. Kesimpulannya, kebijakan ini berhasil meruntuhkan dinding pembatas finansial masyarakat agraris, namun memerlukan simplifikasi birokrasi dan penyediaan unit bantuan pendaftaran di tingkat kecamatan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Khoeru Nikmah
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: khoirun.nkmh1@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan struktural dan mendorong mobilitas sosial vertikal di pedesaan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal yang kuat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mengonversi kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi investasi jangka panjang pembangunan manusia melalui intervensi anggaran beasiswa pendidikan tinggi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Secara sosiologis, mayoritas masyarakat Bojonegoro hidup di sektor agraris sebagai petani tradisional dan buruh tani. Fluktuasi harga komoditas pertanian dan risiko gagal panen menyebabkan pembiayaan kuliah menjadi beban finansial yang berat. *State of the art* dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan tinggi umumnya berfokus pada klaster kemiskinan perkotaan atau prestasi akademik murni secara umum. Terdapat analisis kesenjangan (*gap analysis*) di mana intervensi kebijakan pendidikan daerah yang secara spesifik mengintegrasikan sektor jaring pengaman pertanian—seperti Kartu Petani Mandiri (KPM)—dengan afirmasi beasiswa kuliah masih jarang dikaji secara kritis melalui perspektif studi dokumen kebijakan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi formulasi dan efektivitas implementasi kebijakan beasiswa daerah Bojonegoro dalam memberikan peluang akses pendidikan tinggi bagi anak petani, sekaligus mengidentifikasi tantangan struktural operasionalnya. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam penyempurnaan regulasi jaring pengaman pendidikan di daerah berbasis agraris.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode **analisis kebijakan deskriptif berbasis studi dokumen (*documentary analysis*)**. Peneliti tidak melakukan wawancara tatap muka langsung atau turun ke lapangan, melainkan menelaah naskah regulasi resmi dan laporan data publikasi daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kebijakan (*policy analysis*) berbasis dokumen.

Data dan sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder otoritatif, yang meliputi dokumen hukum Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi, laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan, serta data sosiologis perdesaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*document review*) dengan menelaah teks regulasi, petunjuk teknis (Juknis), dan siaran evaluasi resmi pemerintah daerah. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) model interaktif. Peneliti melakukan reduksi data administratif beasiswa, menyajikan data secara naratif tematik, melakukan triangulasi sumber dokumen hukum, dan menarik kesimpulan terkait keselarasan regulasi dengan realitas sosiologis di lapangan

Hasil dan Pembahasan

Afirmasi Sektor Agraris dalam Regulasi Beasiswa Daerah

Berdasarkan telaah isi terhadap Perbup Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025, struktur kebijakan beasiswa daerah didesain dengan memberikan ruang afirmasi khusus bagi sektor pertanian. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menetapkan syarat kepemilikan Kartu Petani Mandiri (KPM) sebagai salah satu instrumen utama untuk mengakses jalur Beasiswa Dua Sarjana per Desa. Kebijakan ini memprioritaskan anak petani dengan luas lahan garapan di bawah 2 hektare untuk mendapatkan pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh. Hal ini sejalan dengan teori keadilan distributif dalam kebijakan publik, di mana alokasi sumber daya daerah yang bersumber dari sektor ekstraktif (migas) dikembalikan untuk memitigasi kerentanan ekonomi masyarakat kecil di pedesaan.

Peluang Mobilitas Sosial Ekonomi Anak Petani Bojonegoro

Penerapan kebijakan ini membawa dampak positif yang signifikan terhadap struktur ekonomi rumah tangga petani di Bojonegoro. Temuan studi dokumen ini menunjukkan tiga peluang utama yang tercipta:

Tabel 1. Matriks Peluang Kebijakan Beasiswa Daerah

No	Aspek Peluang	Dampak Riil pada Masyarakat Pedesaan
1.	Proteksi Finansial	Mencegah distorsi anggaran rumah tangga akibat biaya UKT semesteran.
2.	Diversifikasi SDM Desa	Membuka jalan lahirnya sarjana terapan baru di lingkungan agraris.
3.	Penguatan Fiskal Keluarga	Mengalihkan alokasi dana kuliah untuk modal produksi pertanian.

Jika dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu mengenai beasiswa umum di wilayah lain, kebijakan di Bojonegoro memiliki keunggulan karena langsung menyasar kelompok rentan berbasis profesi orang tua (petani). Hal ini menurunkan angka anak tidak

sekolah (ATS) pada fase transisi menuju perguruan tinggi dan memicu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kecamatan pinggiran Bojonegoro.

Analisis Tantangan dan Hambatan Administratif Dokumen

Meskipun formulasinya ideal, analisis terhadap dokumen evaluasi internal dan laporan pelayanan publik menunjukkan adanya celah kebijakan (*policy gaps*) yang memicu hambatan di lapangan.

Kesenjangan Digital (*Digital Divide*)

Sistem pendaftaran yang diwajibkan secara daring penuh memicu disparitas akses bagi anak petani di wilayah pelosok (seperti Kecamatan Sekar dan Bubulan). Keterbatasan infrastruktur jaringan internet menyebabkan hambatan teknis saat proses pengunggahan berkas administrasi pada tenggat waktu yang ketat.

Kompleksitas Sinkronisasi Data

Terdapat tumpang tindih birokrasi antara verifikasi kepemilikan Kartu Petani Mandiri (KPM), verifikasi kemiskinan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan surat keterangan dari pihak pemerintahan desa. Ketidaksiharian basis data administrasi lintas sektoral ini sering kali menggagalkan pendaftaran mahasiswa anak petani akibat eror validasi sistem.

Dampak Riil Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga

Melalui data kompilasi capaian penerima beasiswa, kebijakan ini memberikan tiga peluang emas bagi komunitas petani di Bojonegoro:

- **Pencegahan Distorsi Anggaran Rumah Tangga:** Penghasilan petani yang musiman kini tidak perlu dihabiskan untuk membayar UKT yang mahal, sehingga modal panen tetap terjaga untuk musim tanam berikutnya.
- **Diversifikasi Pendapatan Desa:** Anak petani yang berhasil lulus kuliah dari jurusan terapan (seperti pertanian, peternakan, atau teknologi) berpotensi membawa inovasi baru ke desanya masing-masing.
- **Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):** Kebijakan ini secara akumulatif mendorong naiknya persentase lulusan sarjana di tingkat kecamatan pinggiran Bojonegoro yang secara historis memiliki indeks pendidikan rendah.

Kesimpulan

Kebijakan beasiswa pendidikan tinggi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diintegrasikan dengan skema Kartu Petani Mandiri (KPM) merupakan langkah intervensi fiskal yang sangat progresif untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Dengan dukungan anggaran daerah yang masif, kebijakan ini berhasil membuka peluang mobilitas sosial vertikal yang luas bagi anak-anak petani di wilayah perdesaan untuk menempuh kuliah tanpa hambatan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Secara sosiologis dan ekonomi, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah, tetapi juga menjaga ketahanan ekonomi domestik keluarga petani agar modal hasil panen tidak habis dikorbankan untuk biaya pendidikan. Namun, efektivitas capaian kebijakan di

lapangan masih dibatasi oleh celah struktural (*policy gaps*) berupa kesenjangan infrastruktur digital (*digital divide*) yang menghambat serapan informasi di wilayah kecamatan pelosok Bojonegoro. Selain itu, rumitnya birokrasi verifikasi dokumen yang tumpang tindih antara data KPM, DTKS, dan surat administrasi desa, serta pembatasan kuota yang kaku di tingkat desa sering kali memicu hambatan administratif bagi pendaftar dari keluarga miskin. Kendala teknis ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran yang berbasis daring (*online*) penuh belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik masyarakat agraris tradisional di pedesaan. Guna mengoptimalkan keberlanjutan program, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro direkomendasikan untuk menyederhanakan rantai birokrasi melalui integrasi sistem data satu pintu lintas dinas agar proses verifikasi status ekonomi berjalan otomatis. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan posko bantuan pendaftaran (*offline helpdesk*) di tingkat kecamatan untuk memfasilitasi anak petani yang terkendala jaringan internet, serta menerapkan formula kuota proporsional berbasis indeks kemiskinan wilayah. Terakhir, pengembangan sistem pelacakan alumni (*tracer study*) sangat diperlukan untuk memastikan lulusan sarjana anak petani ini dapat kembali berkontribusi memodernisasi sektor pertanian dan industri lokal di Kabupaten Bojonegoro.

Daftar Pustaka

- Afifah. "Anak Petani Pemilik KPM, Bisa Dapatkan Beasiswa Dua Sarjana Per Desa," n.d. <https://bojonegorokab.go.id/berita/6097/anak-petani-pemilik-kpm-bisa-dapatkan-beasiswa-dua-sarjana-per-desa>.
- Bojonegoro, Dinas Pendidikan Kabupaten. "Beasiswa Scientist Dan Beasiswa Miskin 1 Desa 2 Sarjana," n.d. <https://dinaspendidikan.bojonegorokab.go.id/berita/baca/160>.
- Bojonegoro, Dinas Pendidikan Kabupaten, and Jl. Patimura No. 9 Bojonegoro. "Program Beasiswa Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro," n.d. <https://dinaspendidikan.bojonegorokab.go.id/menu/detail/28/ProgramBeasiswa>.
- Redaksi. "Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Pemkab Bojonegoro Siapkan Rp 40,4 Miliar Untuk Beasiswa Tahun 2026," n.d. <https://bojonegorokab.go.id/berita/9393/tingkatkan-kualitas-pendidikan-pemkab-bojonegoro-siapkan-rp-404-miliar-untuk-beasiswa-tahun-2026>.